

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardiansyah. A. *Hukum Perizinan*, 2023.

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Duta Agung Rohmansyah. *Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Fakhry Amin. *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Sanabil, 2022.

Hidayat. *Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Illegal (Studi Tentang Penambangan Pasir Illegal Di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro)*. Universitas Airlangga, 2019.

Inche Sayuna. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Doctoral dissertation, UNS Sebelas Maret University, 2016.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Rizaldy. *Analisis Kualitatif Dampak Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Sajuti Thalib. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.

Salim H.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syamsuddin Haris. *Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: LP3ES, 2014.

Jurnal

- Absori. Dimiyati, K., dan Ridwan, R., “Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik”, *Al- Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 17, No. 2, 2017.
- Achmad Magfur, Mariani Husnul, dan Ahmadi Hasan. “Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4, 2024.
- Ahmad Nugraha Abrar, P”olitik hukum pertambangan dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di Indonesia”, “Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FH UI, 2022.
- Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2, 2021.
- Alfaruq Shah Ghufon, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.1, 2024.
- Apriyanto, Dadang, dan Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritaswiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 3, 2024.
- Astinda, A.N.R., Pratama, W.P. dan Haidar, M.B, “Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan”, *Jurnal USM law review* Vol.7, No. 3, 2024.
- Bayi Priyono, “Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 8 No. 2, 2016.
- Darongke, F., Rumimpunu, D. dan Roeroe, S., “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol.10 No.3, 2022.
- Dewi Tuti Muryati, Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.18, No.1, 2016.
- Felicia Nathania Kindangen, “Penetapan Wilayah Pertambangan Dalam Melakukan Perjanjian Usaha Pertambangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023”, *Lex Administratum* 12.5, 2024.

- Fitri Yanni Dewi Siregar, “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol.7 No.2, 2020.
- Ilyasa, F., Zid, M., dan Miarsyah, M., “Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 2020.
- Kirana Raissa Hamdani dan Christian Andersen, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat”, *Review UNES* 6, No. 3, 2024.
- Laia, Sri Wahyuni, dan Sodialman Daliwu, “Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia”, *Jurnal Education and development* 10.1, 2022.
- Luthfi Hidayat, “Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)”, *Jurnal ADHUM* Vol.7, No.1, 2017.
- Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, *Yogyakarta: Kanisius*, 2018.
- Maulana, R. dan Jamhir, J., “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan.”, *Jurnal Justisia* Vol.3 No.1, 2019.
- Nike Kelly Rumokoy, “Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang”, *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No.5, 2016.
- Priyanta, “Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruan Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, *Hasanuddin Law Review*, No.1, 2015.
- Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, dan Viorelia Nabila Tasya, “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024”, *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* Vol.2, No. 02, 2024.
- Rachman, S. N., dan Tunggati, M. T. “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”, *The Juris*, 2024.

Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih. “Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup”, *Masalah-Masalah Hukum*, 2019.

Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.

Website

“Daftar Ormas yang Menerima Izin Tambang dari Pemerintah” diakses pada 27 Juli 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/26/101500665/daftar-ormas-yang-menerima-izin-tambang-dari-pemerintah?page=all>

“Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah.” diakses pada 30 Juli 2025, https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5_6116232741756338760.pdf

“Tahapan Izin Usaha Pertambangan.” diakses tanggal 25 Mei 2025, <https://dpmpptsp.sumutprov.go.id/regulasidinas/detailregulasidinas/351>